

PENGARUH KEBIJAKAN SUBSIDI, *FOREIGN DIRECT INVESTMENT*
(FDI) DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI
(STUDI KASUS NEGARA – NEGARA DI ASEAN)

RENIZA HELENA PUTRI

Correspondence address: reniza89@gmail.com
Universitas Teknokrat Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan subsidi, FDI, dan tata kelola pemerintahan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dari tujuh negara di ASEAN. Dengan menggunakan metode data panel, di mana data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari World Bank. Kebijakan subsidi harus tepat sasaran agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Selain itu, FDI harus mampu menjadi alat transfer teknologi dan menyerap tenaga kerja bagi negara tujuan investasi. Tata kelola pemerintahan yang baik akan menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih efektif untuk kedepan, di mana faktor keamanan dan kenyamanan suatu negara menjadi fokus utama, baik untuk pemerintahan dan masyarakat negara itu sendiri maupun para investor dan wisatawan.

Kata kunci: *Pertumbuhan ekonomi, Subsidi, Foreign Direct Investment (FDI), Tata Kelola Pemerintahan*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara menandakan berhasilnya pembangunan ekonomi negara tersebut. Salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu dengan menggunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB), yang merupakan total output yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun (Samuelson, 2004). Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari adanya globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang terjadi saat ini, sehingga menyebabkan semakin berkembangnya sistem perekonomian ke arah yang lebih terbuka antarnegara serta terjadinya proses integrasi ekonomi di berbagai wilayah dunia.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan salah satu wujud integrasi ekonomi di wilayah ASIA, yang akan mewujudkan pasar dan basis produksi tunggal di ASEAN yang ditandai dengan perekonomian yang sangat kompetitif serta pembangunan ekonomi yang adil dan mampu berintegrasi dengan perekonomian global (Blueprint AEC, 2008). Tujuan dari MEA tersebut dicantumkan dalam cetak biru (Blueprint) yang dimaksudkan sebagai peta jalan

(roadmap) yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan MEA pada tahun 2015. Dalam cetak biru MEA berisi mengenai rencana aksi, target, dan kurun waktu berbagai kebijakan ekonomi menuju terwujudnya MEA, salah satunya adalah penghapusan secara substansial batasan perdagangan semua sektor pada tahun 2015. Dimana hal tersebut akan berdampak pada peningkatan perdagangan antarnegara ASEAN.

Dari rata-rata pertumbuhan ekonomi negara ASEAN selama delapan tahun, Brunei Darussalam memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah sebesar 2,42% dan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi diperoleh oleh Myanmar sebesar 8,38%. Namun dari 11 negara ASEAN, hanya ada tujuh negara ASEAN yang memiliki kelengkapan data dari tahun 2008 hingga tahun 2015 yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand sehingga dalam penelitian yang digunakan sebagai sampel data ada tujuh negara ASEAN.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi memerlukan kebijakan pemerintah termasuk kebijakan subsidi dan Foreign Direct Investment (FDI). Subsidi merupakan suatu kebijakan yang dapat membantu produsen dalam memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih rendah serta membantu konsumen dalam memperoleh harga barang atau jasa yang lebih rendah dari harga yang telah ditetapkan. Subsidi dapat berarti mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh produsen, dimana ongkos produksi akan turun, sehingga hasil produksi meningkat dan diikuti dengan daya beli masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang juga meningkat. Hal ini senada dengan Omar (2016) yang menyatakan bahwa subsidi merupakan alat untuk meningkatkan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selain kebijakan subsidi, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara akan tumbuh dengan baik apabila didukung oleh kebijakan investasi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri berupa investasi asing langsung. Foreign Direct Investment (FDI) merupakan arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain (Krugman, 1999). FDI menjadi salah satu bukti bahwa perekonomian sudah semakin global dan merupakan salah satu faktor utama pendorong perekonomian negara.

Dengan adanya FDI, tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan luar negeri. Azam et al. (2015) dalam penelitiannya mengenai pengaruh FDI dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS), menjelaskan bahwa FDI dan ekspor berpengaruh positif dan menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dua arah dan signifikan. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa FDI dan ekspor berpengaruh positif dan signifikan sehingga menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Hoang, Wiboonchutikula, dan Tubtintong (2010) mengenai pengaruh FDI terhadap pertumbuhan ekonomi di Vietnam, menjelaskan bahwa

FDI mempunyai pengaruh yang rendah terhadap pertumbuhan ekonomi di Vietnam. Untuk nilai rata-rata FDI tertinggi yaitu negara Singapura sebesar 18,56% dan nilai rata-rata FDI terendah yaitu negara Filipina sebesar 1,25% persen.

Selain kebijakan subsidi dan FDI, diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai penunjang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan dalam penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governance*) ditentukan oleh keterlibatan dan sinergi dari tiga peran utama yaitu aparat pemerintah, masyarakat dan pihak swasta (Agus, 2011). Konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* pertama diusulkan oleh World Bank, UNDP dan Asian Development Bank (ADB), yang kemudian dikembangkan oleh banyak pakar di negara-negara berkembang guna mewujudkan gagasan-gagasan baik menyangkut tata pemerintahan. Mengacu pada laporan World Bank yang ditulis oleh Kaufman, Kraay dan Zoido-Lobaton (2009), terdapat hubungan langsung antara *good governance*, *stable government* dan sosial ekonomi yang lebih baik.

World Bank melalui Macroeconomics and Growth Team-Development Research Group, sejak tahun 1996 mengeluarkan enam indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas *good governance* di tiap negara yaitu: *control of corruption, government effectiveness, political stability and absence of violence, regulatory quality, rule of law* dan *voice and accountability* (www.govindicators.org). Namun, selanjutnya menurut World Bank ada empat dimensi tata kelola pemerintahan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu *government effectiveness, rule of law, control of corruption* dan *regulatory quality* (World Bank, 2017). Setiap indikator yang dikeluarkan oleh World Bank menggunakan penilaian indeks antara -2,5 sampai dengan 2,5. Dimana angka -2,5 menunjukkan bahwa prestasi dari setiap indikator *good governance* di negara tersebut dinilai terburuk dan angka 2,5 menunjukkan bahwa prestasi dari setiap indikator *good governance* di negara tersebut dinilai terbaik.

Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh *government effectiveness*. Md Rafayet dkk (2017) menyatakan bahwa *government effectiveness* memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN.

Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan aturan dalam masyarakat dan penegakan hukum, sebagaimana dijelaskan oleh salah satu indikator *good governance* yaitu *rule of law*. *Rule of law* merupakan salah satu indikator penting dalam menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sebab *rule of law* mampu membatasi kewenangan pemerintah agar tidak menjadi pemerintahan yang korup.

Selain *government effectiveness* dan *rule of law*, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh indikator tata kelola pemerintahan yaitu *regulatory quality*. *Regulatory quality* dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

terutama di negara-negara ASEAN, sebagaimana penemuan yang dilakukan oleh Marlina (2016) bahwa *regulatory quality* merupakan ukuran kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta peraturan dan mempromosikan pengembangan sektor swasta.

Indikator tata kelola pemerintahan selanjutnya yang dianggap berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah *control of corruption*. Kaufman et al. dalam Huynh dan Jacho-Chávez (2009) menyatakan bahwa *control of corruption*, merupakan ukuran sejauh mana kekuasaan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan untuk melakukan tindakan korupsi.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris bahwa apakah kebijakan subsidi, *Foreign Direct Investment* (FDI), *government effectiveness*, *rule of law*, *regulatory quality* dan *control of corruption* mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2008-2015.

TEORI DAN HIPOTESIS

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2007). Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) tanpa memandang bahwa kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya (Suryana, 2002).

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah kondisi dimana meningkatnya pendapatan karena terjadi peningkatan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai (Sukirno, 2011)

Proses pertumbuhan ekonomi menurut David Ricardo dalam (Sukirno,2010), yaitu :

1. Pada mulanya jumlah penduduk rendah dan kekayaan alam masih melimpah sehingga para pengusaha memperoleh keuntungan yang tinggi. Pembentukan modal tergantung pada keuntungan, maka laba yang tinggi tersebut akan diikuti dengan pembentukan modal yang tinggi pula. Maka pada tahap ini akan terjadi kenaikan produksi dan peningkatan permintaan kerja.
2. Tahap kedua jumlah tenaga kerja diperkejakan bertambah, maka upah akan naik dan kenaikan upah tersebut akan mendorong pertambahan penduduk. Karena luas tanah tetap, maka makin lama tanah yang digunakan mutunya akan semakin rendah, akibatnya setiap tambahan hasil yang diciptakan oleh masing-masing pekerja akan semakin berkurang,semakin terbatasnya jumlah tanah yang dibutuhkan, maka harga sewa tanah akan semakin tinggi. Hal tersebut akan mengganggu keuntungan pengusaha yang menyebabkan pengusaha tersebut mengurangi pembentukan modal dan menurunkan permintaan tenaga kerja yang berakibatkan turunnya tingkat upah.
3. Tahap selanjutnya ditandai menurunnya tingkat upah dan pada akhirnya akan berada pada tingkat minimal. Pada tingkat ini, pembentukan modal baru tidak akan terjadi lagi karena sewa tanah yang sangat tinggi menyebabkan pengusaha tidak memperoleh keuntungan.

Subsidi

Subsidi adalah pembayaran berbalas yang saat ini dilakukan oleh pemerintah untuk perusahaan berdasarkan tingkat aktivitas produksi, kuantitas, nilai dari barang atau jasa yang mereka produksi, jual, ekspor, atau impor, untuk mempengaruhi tingkat produksi, harga output yang dijual, atau penggajian perusahaan (IMF 2001). Subsidi juga didefinisikan sebagai tindakan pemerintah yang menurunkan biaya produksi, meningkatkan pendapatan produsen, atau menurunkan harga yang dibayarkan oleh konsumen (IEA, OECD & World Bank, 2010).

Subsidi adalah pemberian pemerintah kepada produsen untuk mengurangi biaya produksi yang ditanggung produsen. Subsidi dapat menurunkan harga. Sampai dimana besarnya keuntungan yang diperoleh pembeli dengan adanya subsidi adalah bergantung kepada besarnya penurunan harga yang berlaku (Rofyanto dan Tri, 2017)

Subsidi merupakan kebijakan yang ditujukan untuk membantu kelompok konsumen tertentu agar dapat membayar produk atau jasa yang diterimanya dengan tarif dibawah harga pasar dengan cara memberikan bantuan keuangan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah untuk

mengurangi harga atau menambah keluaran (output). Subsidi merupakan aktifitas ekonomi yang wajar. Subsidi bukanlah sesuatu yang menyalahi aturan apapun.

Kebijakan pemberian subsidi biasanya dikaitkan kepada barang dan jasa yang memiliki positif eksternalitas dengan tujuan agar untuk menambah output dan lebih banyak sumber daya yang dialokasikan ke barang dan jasa tersebut, misalnya pertanian.

Rasionalisasi dari diberikannya subsidi harga adalah karena subsidi harga dapat digunakan sebagai mekanisme pemerataan. Dalam beberapa jenis penyediaan barang publik, subsidi harga dapat digunakan untuk mengoreksi ketidak sempurnaan pasar. Di samping itu, subsidi pertanian terhadap penyediaan barang-barang kebutuhan pokok dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin (Nazir & Hasanudin, 2004).

Foreign Direct Investment (FDI)

Menurut Krugman (1994), investasi asing langsung ialah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas usahanya di negara lain. Ciri yang menonjol dari penanaman modal asing langsung adalah melibatkan bukan hanya pemindahan sumber daya tetapi juga pemberlakuan pengendalian (*control*). Yakni, cabang atau anak perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban finansial kepada induk perusahaannya, namun merupakan bagian dari struktur organisasi yang sama.

Tata Kelola Pemerintahan

Pertumbuhan perekonomian suatu negara saat ini bukan hanya diukur dari sisi kebijakan fiskal atau moneterinya saja, melainkan dilihat dari sisi pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan tata kelola pemerintahan yang mumpuni, suatu negara akan mampu mengorganisir berbagai kebijakan, bukan hanya di bidang politik, hukum, sosial atau pun kebudayaan tetapi juga dari sisi ekonomi.

Indikator Tata Kelola Dunia (*Worldwide Governance Indicators/ WGI*)

Indikator *good governance* yang baik menurut *World Bank* melalui *Macroeconomics and Growth Team-Development Research Group*, sejak tahun 1996 dalam mengukur kualitas *good governance* di tiap negara yaitu : *control of corruption, government effectiveness, political stability and absence of violence, regulatory quality, rule of law dan voice and accountability*. Setiap indikator yang dikeluarkan oleh *world bank* menggunakan penilaian indeks antara -2,5 sampai dengan 2,5. Dimana angka -2,5 menunjukkan bahwa prestasi dari setiap indikator *good governance* dinegara tersebut dinilai terburuk dan angka 2,5 menunjukkan bahwa prestasi dari setiap indikator *good governance* dinegara tersebut dinilai terbaik.

Namun hanya empat indikator yang penting dalam menjalankan suatu tata kelola pemerintahan yang baik yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di

suatu negara yaitu: *Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law, Control of Corruption*

TINJAUAN EMPIRIS

K.A Hamid dan Z.A Rashid (2012) menyatakan input energy murah dan penundaan dalam rasionalisasi subsidi merupakan ancaman signifikan bagi daya saing ekonomi berkelanjutan di kawasan Malaysia.

Z. Omar dan F.P Kanan (2016) menyatakan subsidi merupakan alat untuk meningkatkan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Lamsiraroj dan Doucouliagos (2015) menyatakan FDI menyebabkan adanya transfer modal, teknologi dan ilmu pengetahuan yang akan menstimulus produktivitas serta penambahan output nasional sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat.

Kevin H. Zhang (2006) menyatakan FDI mendorong pertumbuhan pendapatan negara, dan efek pertumbuhan positif ini meningkat dari waktu ke waktu.

Marlina Lumban Gaol (2016) menyatakan bahwa *control of corruption, government effectiveness, rule of law, dan voice and accountability* tidak signifikan sedangkan *political stability and absence violence* dan *regulatory quality* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *World Bank*. Di mana data penelitian akan diolah menggunakan teknik data panel yang merupakan kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Dalam penelitian ini, data *cross section* yang digunakan adalah data negara ASEAN dengan *time series* periode 2008 sampai 2015. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah negara-negara di ASEAN. Sedangkan sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah tujuh negara ASEAN diantaranya Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Dalam penelitian ini digunakan metode *Non Probability Sampling* dengan teknik *purposive sampling* yang digunakan untuk pengambilan sampel di mana metode penetapan sampel dengan cara menentukan target dari elemen populasi yang diperkirakan paling cocok untuk dikumpulkan datanya (Sugiyono, 2011).

Model ekonometrika yang akan digunakan untuk menganalisis pengaruh subsidi, tata kelola pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN yaitu:

$$Y = \alpha + \alpha_1 SUB_{it} + \alpha_2 FDI_{it} + \alpha_3 GE_{it} + \alpha_4 RL_{it} + \alpha_5 RQ_{it} + \alpha_6 CC_{it} + \varepsilon_{it}$$

Setelah data diolah, maka dilakukan pengujian dengan metode data panel yang terdapat tiga pendekatan dalam perhitungan model data panel yaitu metode *Pooled Least Squares* (PLS), metode *Fixed Effect* (FEM), metode *Random Effect* (REM). Untuk menentukan metode apa yang akan digunakan dalam penelitian, maka dilakukan uji kesesuaian model melalui beberapa tahapan yaitu dengan uji *Chow* dan uji *Hausman*. Uji *Chow* merupakan pengujian yang bertujuan untuk memilih model terbaik antara *fixed effect* model atau *common effect* model. Dan uji *Hausman* merupakan uji yang bertujuan untuk menentukan model antara *fixed effect* model atau *random effect* model yang merupakan model paling sesuai pada penelitian ini. Evaluasi model berdasarkan kriteria statistik dilakukan dengan beberapa pengujian antara lain koefisien determinasi (R^2), uji F-statistik, dan uji t-statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN selama tahun 2008-2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh kebijakan Subsidi (SUB), *Foreign Direct Investment* (FDI), *Government Effectiveness* (GE), *Rule of Law* (RL), *Regulatory Quality* (RQ) dan *Control of Corruption* (CC) terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN selama tahun 2008-2015, sehingga persamaan analisis regresi data panel dalam penelitian ini adalah:

$$Y_{it} = -377,8082 + 0,660836 SUB_{it} + 16,77764 FDI_{it}^* + 204,2730 GE_{it}^* - 1133,416 RL_{it}^* + 673,7250 RQ_{it}^* + 345,1575 CC_{it}^*$$

Persamaan analisis regresi di atas menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar -377,8082. Makna dari koefisien konstanta tersebut adalah apabila kebijakan Subsidi (SUB), *Foreign Direct Investment* (FDI), *Government Effectiveness* (GE), *Rule of Law* (RL), *Regulatory Quality* (RQ) dan *Control of Corruption* (CC) nilainya adalah 0 maka pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan negatif sebesar -377,8082.

Pengaruh Subsidi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Tujuh Negara ASEAN

Berdasarkan hasil regresi, koefisien regresi untuk variabel Subsidi (SUB) menunjukkan tanda yang positif, yaitu sebesar 0,660836. Namun berdasarkan uji signifikansi parsial, pengaruh variabel Subsidi terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN selama periode 2008-2015 menunjukkan angka yang tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} variabel Subsidi sebesar 0,435138 lebih kecil daripada t_{tabel} sebesar 1,684 dengan taraf nyata $\alpha = 0,05$. Sehingga, subsidi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN selama periode 2008-2015.

Pengaruh *Foreign Direct Investment* (FDI) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Tujuh Negara ASEAN

Berdasarkan hasil regresi, koefisien regresi untuk variabel *Foreign Direct Investment* (FDI) menunjukkan tanda yang positif, yakni sebesar 16,77764. Berdasarkan uji signifikansi parsial, pengaruh variabel FDI terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN selama periode 2008-2015 menunjukkan angka yang signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} variabel FDI sebesar 4,233274 lebih besar daripada t_{tabel} sebesar 1,684 dengan taraf nyata $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN selama periode 2008-2015. Hal ini berarti bahwa dengan kenaikan FDI sebesar satu persen maka akan berakibat pada kenaikan pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN selama periode 2008-2015 sebesar 16,77764 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil ini sejalan dengan Lamsiraroj dan Daucouliagos (2015), dimana variabel FDI berpengaruh positif dan signifikan.

Pengaruh *Government Effectiveness* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Tujuh Negara ASEAN

Berdasarkan hasil regresi, koefisien regresi untuk variabel *Government Effectiveness* (GE) menunjukkan tanda yang positif, yakni sebesar 204,2730. Berdasarkan uji signifikansi parsial, pengaruh variabel *government effectiveness* terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN selama periode 2008-2015 menunjukkan angka yang signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} variabel *government effectiveness* sebesar 2,243683 lebih besar daripada t_{tabel} sebesar 1,684 dengan taraf nyata $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, *government effectiveness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN selama periode 2008-2015. Hal ini berarti bahwa dengan kenaikan *government effectiveness* sebesar satu indeks maka akan berakibat pada kenaikan pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN selama periode 2008-2015 sebesar

204,2730 indeks dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil ini sejalan dengan Md Rafayet (2017), dimana variabel *government effectiveness* berpengaruh positif dan signifikan.

Pengaruh *Rule of Law* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Tujuh Negara ASEAN

Berdasarkan hasil regresi, koefisien regresi untuk variabel *Rule of Law* (RL) menunjukkan tanda yang negatif, yakni sebesar -1133,416. Berdasarkan uji signifikansi parsial, pengaruh variabel *rule of law* terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN selama periode 2008-2015 menunjukkan angka yang signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} variabel *rule of law* sebesar -4,793403 lebih besar daripada t_{tabel} sebesar -1,684 dengan taraf nyata $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, *rule of law* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN selama periode 2008-2015. Hal ini sesuai dengan kondisi yang terjadi, di mana ketika penegakan hukum dijalankan dengan baik maka akan menurunkan tingkat kejahatan atau tingkat pelanggaran yang dilakukan sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Yilmaz Bayar (2016) yang menyatakan bahwa penegakkan hukum memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Haggard dan Tiede (2010) juga menganalisis hubungan kausalitas antara penegakkan hukum dan pertumbuhan ekonomi, penelitian ini mengemukakan bahwa penegakkan hukum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara maju.

Pengaruh *Regulatory Quality* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Tujuh Negara ASEAN

Berdasarkan hasil regresi, koefisien regresi untuk variabel *Regulatory Quality* (RQ) menunjukkan tanda yang positif, yakni sebesar 673,7250. Berdasarkan uji signifikansi parsial, pengaruh variabel *regulatory quality* terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN selama periode 2008-2015 menunjukkan angka yang signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} variabel *regulatory quality* sebesar 4,125247 lebih besar daripada t_{tabel} sebesar 1,684 dengan taraf nyata $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, *regulatory quality* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN selama periode 2008-2015. Hal ini berarti bahwa setiap pelaksanaan kebijakan serta peraturan sebesar satu indeks maka akan berakibat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN selama periode 2008-2015 sebesar 673,7250 indeks dengan asumsi *ceteris paribus*. Adanya peningkatan terhadap kemampuan pemerintah untuk pelaksanaan kebijakan serta peraturan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN. Hasil penelitian ini sesuai dengan Yilmaz Bayar (2016)

yang menyatakan bahwa *regulatory quality* memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh *Control of Corruption* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Tujuh Negara ASEAN

Berdasarkan hasil regresi, koefisien regresi untuk variabel *Control of Corruption* (CC) menunjukkan tanda yang positif, yakni sebesar 345,1575. Berdasarkan uji signifikansi parsial, pengaruh variabel *control of corruption* terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN selama periode 2008-2015 menunjukkan angka yang signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} variabel *control of corruption* sebesar 3.380756 lebih besar daripada t_{tabel} sebesar 1,684 dengan taraf nyata $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, *control of corruption* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN selama periode 2008-2015. Maka ini berarti bahwa setiap pengendalian korupsi sebesar satu indeks maka akan berakibat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN selama periode 2008-2015 sebesar 345,1575 indeks dengan asumsi *ceteris paribus*. Hal ini sesuai dengan penelitian Daniel Kaufmann (2005) dan Yilmaz Bayar (2016) yang menyatakan bahwa kualitas tata kelola di sejumlah negara telah berubah secara signifikan dan *control of corruption* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Interpretasi Metode *IndividualFixed Effect*

Hasil interpretasi metode *individualfixed effect* pada tujuh negara ASEAN dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:

Hasil Interpretasi *IndividualFixed Effect*

Variabel	Koefisien
C	-377,8082
SUB	0,660836
FDI	16,77764
GE	204,2730
RL	-1133,416
RQ	673,7250
CC	345,1575
<i>Fixed Effect (Cross)</i>	<i>Effect</i>
INDONESIA	124,1122
KAMBOJA	-103,3702
LAOS	484,1748
MALAYSIA	-105,9443

FILIPINA	47,47016
SINGAPURA	-481,6215
THAILAND	35,17888

Sumber: Lampiran 8 (Data diolah)

Tabel diatas menunjukkan nilai dari koefisien *Fixed Effect* dari tujuh negara di ASEAN, dimana masing-masing nilai koefisien dari *Fixed Effect* negara-negara tersebut menunjukkan nilai yang berbeda. Tabel 4.8 tersebut juga menjelaskan bahwa variabel bebas yakni Subsidi

(SUB), *Foreign Direct Investment* (FDI), *Government Effectiveness* (GE), *Regulatory Quality* (RQ) dan *Control of Corruption* (CC) memiliki pengaruh positif terhadap variabel terikat yakni Pertumbuhan Ekonomi (PE) di tujuh negara ASEAN, sedangkan *Rule of Law* (RL) memiliki pengaruh negatif yang signifikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil uji regresi dan analisis data mengenai pengaruh kebijakan Subsidi, *Foreign Direct Investment* (FDI) dan Tata Kelola Pemerintahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di negara-negara ASEAN, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Subsidi (SUB) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN selama periode 2008-2015. (2) *Foreign Direct Investment* (FDI) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN selama periode 2008-2015. (3) *Government Effectiveness* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN selama periode 2008-2015. (4) *Rule of Law* berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN selama periode 2008-2015. (4) *Regulatory Quality* menunjukkan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN selama periode 2008-2015. (5) *Control of Corruption* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN selama periode 2008-2015. (5) Ada tiga negara yang memiliki koefisien *fixed effect* bernilai negatif yaitu Kamboja, Malaysia dan Singapura sehingga pertumbuhan ekonominya bergantung kepada kebijakan subsidi, FDI dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan ada empat negara yang memiliki koefisien *fixed effect* bernilai positif yaitu Indonesia, Laos, Filipina dan Thailand yang pertumbuhan ekonominya dipengaruhi oleh faktor selain kebijakan subsidi, FDI serta tata kelola pemerintahan seperti sumber daya alam, pertanian, dan lain-lain.

SARAN

Dari hasil uji dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran kebijakan kepada pemerintah agar Subsidi, *Foreign Direct Investment* (FDI), dan tata kelola pemerintah mampu dijaga serta ditingkatkan

kualitasnya sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB. 1998. Annual Report. Manila. Asian Development Bank (ADB).
- Aidt, Toke, Jayasri Dutta dan Vania Sena. 2008. Governance Regimes, Corruption and Growth: Theory and Evidence. *Journal of Comparative Economics* 36 (2008) 195–220.
- Alam, Rafayet, Erick Kitenge, and Bizuayehu Bedane. 2017. Government Effectiveness and Economic Growth. *Economic Buletin*. Vol 37 issue I.
- Aldaba, M. Rafaelita dan Josef T. Yap, 2009. Investment and Capital Flows: Implication of the ASEAN Economic Community. Philippine Institute for Development Studies.
- Anoraga, Pandji. 1995. Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing, Jakarta: Pustaka Jaya
- Azam, Muhammad., Khan, Saleem., Zainal, binti Zalina., Karuppiah, Namasivayam., Khan, Farah. 2015. Foreign Direct Investment and Human Capital: Evidence From Developing Countries. *Investment Management and Financial Innovation*, 12 (3-1). Journal.
- Badun, Marijana. 2006. The Quality of Governance and Economic Growth in Croatia. Occasional Paper No. 29.
- Baltagi, Bagi. 2005. *Econometric Analysis of Panel Data*, Third Edition. John Wiley & Sons.
- Bayar, Yilmaz. 2016. Public Governance And Economic Growth In The Transitional Economies Of The European Union. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, No. 48 E/2016, pp. 5-18.
- Habib Nazir dan Muhammad Hassanudin, 2004. *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung: Kaki Langit.

Sukirno, Sadano. 2010. Makro Ekonomi Teori Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sukirno, Sadono. 2011. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta Rajawali Pers.

Rofyanto Kurniawan dan Tri Wibowo. 2017. *Seri Analisis Kebijakan Fiskal Dinamika Kebijakan Subsidi Pupuk dan Ketahanan Pangan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.